Efektifitas Pelaporan Pajak *Online* di Indonesia Berbasis Cobit 5.0 pada Domain MEA (*Monitor*, *Evaluate*, *Assess*)

Faustina Gunadi, Septian Rheno Widianto

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer LIKMI, Bandung, Indonesia Email: v.tinagunadi@yahoo.com, septian.rheno@likmi.ac.id

Abstrak—Bermula dari tahun 2015 saat pemerintah merilis aturan *Tax Amnesty* yang menarik kesadaran para wajib pajak untuk melaporkan aset yang dimilikinya serta membayar kewajibannya, memicu pemerintah untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mulai bertahap mengajak para Wajib Pajak lapor pajak secara *online* sosialisasi dari tahun 2016 cukup mendapat respon yang baik karena pendapatan pajak ada peningkatan. Berangkat dari 2016 sampai tahun berikutnya pemerintah mulai mewajibkan pada perusahaan kena pajak untuk melaporkan pajaknya *online* dengan metode *selfassessment*. Terobosan pelaporan *online* ini cukup tegas ditentuksn harus dari tahun 2017. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji efektifitas pelaporan pajak ini, yang hasil pelaporan *selfassessment* ini sejalan dengan domain MEA pada Cobit 5.0. Peneliti menggunakan *data* sekunder pada situs resmi Kementrian Keuangan untuk melihat *progress* laporan keuangan audited saat pelaporan pajak sudah *online*. Setelah mengkaji antara hasil laporan keuangan audited dan poin pada domain MEA disimpulkan pelaporan pajak *online* ini sejalan dengan domain MEA dan efektif.

Kata Kunci: Pelaporan Online, Lapor Pajak, Domain Mea, Cobit, Pelaporan Digital, Analisa Efektifitas

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2015, pelaporan pajak secara *digital* untuk wajib pajak di Indonesia secara konsisten terus menerus disosialisasikan kepada seluruh wajib pajak. Selama tahun 2015 sampai dengan 2019 *program* reformasi pelaporan digitalisasi pajak sudah memperoleh respon yang cukup positif.

Peningkatan pelaporan pajak *online* yang terus menerus bertambah, memudahkan Dirjen Pajak untuk mengevaluasi dan memonitor para wajib pajak. Sehingga pemenuhan *Tax Compliance* diharapkan dapat memenuhi target pajak yang sudah direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Melihat kesadaran para wajib pajak untuk melaporkan pajak secara *online* menarik perhatian peneliti untuk menelusuri fenomena digitalisasi pada bidang perpajakan di Indonesia dengan menganalisa data yang tercatat pada Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak untuk kemudian ditelaah lebih lanjut dengan menggunakan *domain* MEA (*Monitor, Evaluate, Assess*) pada Cobit 5.0.

Fokus yang ditelaah oleh peneliti dari *data* yang tersaji adalah pemenuhan laporan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Dirjen Pajak, yang pelaporannya menggunakan pelaporan pajak *online*.

Penerapan digitalisasi laporan pajak ini akan menunjukan tingkat pemahaman dan kesesuaian pencapaian selfassessment report yang dibuat oleh wajib pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Peneliti menelaah efektifitas pelaporan pajak online dengan mengukurnya menggunakan kerangka COBIT 5.0 pada domain MEA (Monitor, Evaluate, Assess). Dikarenakan pada hasil implementasi dari pelaporan digital pajak dapat menggambarkan: tanggung jawab pemangku kepentingan tertinggi, kesesuaian dengan aturan dan peraturan perusahaan yang berlaku, dan kebutuhan dari pihak eksternal perusahaan terpenuhi.

Berdasarkan yang berjalan saat ini perlu ditelaah efektifitas pelaporan pajak *online* di Indonesia, yang kesesuaiannya diukur dengan menggunakan Cobit 5.0 *domain* MEA (*Monitor, Evaluate, Assess*) untuk dilihat korelasinya berdasarkan data publikasi yang sudah di*release* oleh Dirjen Pajak. Kemudian, menilainya berdasarkan poin – poin yang sudah ditetapkan dalam Cobit 5.0 *domain* MEA (*Monitor, Evaluate, Assess*)

2. METODOLOGI PENELITIAN

Analisa terhadap pelaporan pajak *online* ini perlu ditelaah lebih lanjut dikarenakan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya kepada negara yang akan membuat negara bisa merencanakan langkah strategis negara dan pembangunan infrastruktur untuk mendukungnya. Secara respon terhadap teknologi pemerintah menyikapinya cukup cepat, walaupun bertahap dalam sosialisasinya akan tetapi implementasi digitalisasi pelaporan pajak sudah diterapkan secara konsisten.

Peneliti dalam menganalisa efektifitas pelaporan *digital* ini perlu mendalami teori efektifitas yang secara teori menurut (Gibson, 2012: 39) efektifitas diukur dengan mengevaluasi pencapaian yang sudah dilakukan terhadap *target*, untuk mencapai efektifitas yang diinginkan maka harus mencapai 3 perspektif efektifitas, yakni: efektifitas individu, efektifitas grup, efektifitas organisasi [1]. Berdasarkan penjelasan Gibson bisa disimpulkan yang efektifitas perlu diperkuat mulai dari individunya terlebih dahulu baru ke cakupan yang lebih luas.

Berdasarkan teori efektifitas langkah yang dilakukan pemerintah sudah tepat yang kesadaran pelaporan *digital* pertama kali mulai ditegaskan untuk pelaporan wajib pajak perorangan, selanjutnya penerapan secara bertahap kepada UMKM dan pelaku Bisnis skala besar.

Pelaporan pajak *online* merupakan salah satu langkah peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kewajibannya kepada negara oleh karena itu Kantor Pajak ditiap wilayah harus memberikan pelayanan prima dengan mengacu pada aturan yang diterbitkan, yakni Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-01/PJ/2018 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak *Online* didalamnya menjelaskan tata cara penerbitan, pengiriman, dan aktivasi EFIN, tata cara penyampaian EFIN, panduan verifikasi identitas Wajib Pajak dan penatausahaan dokumen aktivasi EFIN.

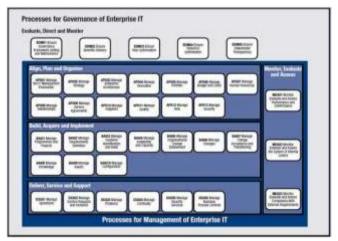
Pelaporan pajak menggunakan *selfassessment* yang dalam pelaporannya pemerintah menyerahkan kepada seluruh wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya secara mandiri mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Dengan dasar ini maka seluruh wajib pajak menjadi penanggung jawab langsung karena sudah diberikan kebebasan oleh Kantor Pajak.

Pelaporan pajak secara *online* ini pun memudahkan kantor pajak untuk mengecek antara laporan pajak dengan Surat Perintah Membayar dan Surat Pemberitahuan Tahunan bagi perusahaan – perusahaan, sedangkan perorangan pelaporannya setiap tahun dengan melaporkan bukti potong pajak penghasilan. Pelaporan secara *online* pun membuat proses lebih efisien karena *paperless* dan memudahkan kantor pajak dalam pengecekan data.

Mengutip dari (Hakim, Muhammad Malik) dalam Jurnal berjudul Analisa Model Penerimaan Pengguna Sistem Pelaporan Pajak *Online*, disampaikan penerapan e-SPT dan e-Filling telah digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi [2]. Cobit 5 membagi antara Tata Kelola dan proses manajemen IT dibagi menjadi 2 proses utama [3]:

- 1. Tata Kelola terdiri dari 5 proses tata kelola, yaitu EDM (*Evaluate, Direct, Monitor*)
- 2. Manajemen terdiri dari 4 proses, berkorelasi dengan lingkup perencanaan, merancang, dioperasikan, dimonitor (PBRM), mewakili proses dalam IT tahapan ini adalah evolusi dari COBIT 4.1. Nama domain yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. Align, Plan, Organise (APO)
- b. Build, Acquire, Implement (BAI)
- c. Deliver, Service, Support (DSS)
- d. Monitor, Evaluate, Assess (MEA)

Setiap proses diwakili oleh *domain*, setiap proses mewakili perencanaan, implementasi, eksekusi, monitor, setiap aktivitas proses atau setiap masalah (seperti: kualitas, keamanan), tempatkan pada domain area yang terkait sesuai dengan level IT-nya.



Gambar 1. COBIT 5 – MODEL PROSES

Domain MEA pada Model Proses Cobit 5 menjabarkan, sebagai berikut:

MEA 1 – *Monitor*, Evaluasi, Penilaian Kinerja dan Kesesuaian

MEA 2 – Monitor, Evaluasi, Penilaian Pengendalian Internal Sistem

MEA 3 – Monitor, Evaluasi, Penilaian Kesesuaian dengan Kebutuhan Eksternal

Berdasarkan *domain* MEA ini pengaplikasikan pelaporan pajak *online* sangat mewakili kepatuhan perusahaan untuk melaporkan laporannya sesuai aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Hal ini dapat terlihat dari perbaikan pelaporan pajak secara *online* yang semakin terus meningkat dan upaya pemerintah baik dalam sosialisasi serta bertahap menetapkan aturan pelaporan *online*.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan *variable* yang akan diteliti oleh peneliti analisa efektifitas pelaporan pajak *online* menarik perhatian peneliti, dikarenakan fenomena pelaporan *online* untuk pajak setiap tahunnya meningkat dan pemerintah Indonesia termasuk konsisten dalam mengupdate dan menerapkan aturan pelaporan pajak *online*. Kemudian berkenaan dengan tata kelola perusahaan yang baik wujud dari pelaporan *online* ini dapat mencerminkan cara perusahaan untuk membuat laporan yang sudah divalidasi keabsahannya dan kesesuaiannya dengan aturan, sehingga perusahaan dengan kesadaran masing – masing melaporkan kewajibannya kepada negara.

Selain itu, untuk menelaah lebih dalam maka peneliti melakukan pengumpulan data langsung dari website Kantor Pajak untuk melihat data secara kualitatif atas perkembangan yang sudah diupayakan pemerintah dan berdampak pada pendapatan negara. Tahap tersebut dimulai dari :

a. mengidentifikasi permasalahan

- b. melakukan pengumpulan data sekunder dari situs resmi
- c. menganalisa sasaran yang ingin dicapai dan kaitan pelaporan pajak digital ini dengan MEA
- d. identifikasi lebih lanjut gap yang muncul
- e. merumuskan hasil evaluasi dan rekomendasi yang bisa ditingkatkan dari program saat ini
- f. kesimpulan

Berdasarkan identifikasi permasalahan penggunaan digitalisasi pelaporan pajak membutuhkan peran sosialisasi yang cukup konsisten bersamaan dengan hal ini data dari Dirjen Pajak berbagai daerah dapat menunjukan efektifitas pelaporan digital. Semua data yang diungkap pada laporan Dirjen Pajak dicek kesesuaiannya dengan domain MEA pada COBIT 5.0

Berdasarkan penelitian dari data laporan keuangan yang sudah *Audited* dan dipublish oleh Kementrian Keuangan secara analisa efektifitas pelaporan pajak digital memperoleh peningkatan yang cukup baik bila melihat infografik dari Direktorat Jendrak Pajak tahun 2016 sampai dengan 2019 pencapaian Tax Ratio Indonesia meningkat setelah mulai tahun 2015 ada kebijakan Tax Amnesti dan mulai tahun 2016 sudah bertahap pelaporan pajak *online* via DJP *online* dengan pembuatan e-fin bagi wajib pajak. Secara tax Ratio sebagai berikut:

Tabel 1. Peningkatan Tax Ratio Indonesia

Tahun	2016	2017	2018	2019
Tax Ratio	10,8%	10,7%	11,5%	11,9%

Sumber: Direktorat Jendral Pajak – infografik. www.kemenkeu.go.id [4]

Melihat efektifitas pencapaian sesuai dengan *target* yang efektifitas dimulai dari individu, group, organisasi, benar adanya pencapaian efektifitas pelaporan pajak *digital* sejalan dengan literatur tersebut dikarenakan peningkatan *tax ratio* ini bertahap meningkat dari pelaporan pajak individu dan organisasi. Akan tetapi, secara pencapaian target pemerintah belum sampai target yang diinginkan yakni 15%. Akan tetapi, peran efektifitas membuktikan peran pemerintah perlu ditingkatkan untuk mencapai targetnya. Framework Cobit 5.0 domain MEA terhadap penerapan pelaporan *digital* pajak, menghasilkan sebagai berikut:

a. MEA 1 – Monitor, Evaluasi, Penilaian Kinerja dan Kesesuaian

Berdasarkan aturan perpajakan yang pemerintah memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk melaporkan secara *selfassessment* dapat dilihat dari hasil pendapatan pajak negara yang terdokumentasikan pada *audited* laporan keuangan sebagai berikut:

Tabel 2. Pendapatan Negara atas Pajak Indonesia

Pendapatan Negara	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Pajak (IDR)	1,060,860,570,511,082	1,355,203,515,121,014	1,343,529,843,798,510	1,518,789,777,151,030

Sumber: Direktorat Jendral Pajak – infografik. www.kemenkeu.go.id [4]

Hasil pelaporan *digital* yang dilakukan secara *selfassessment* mendapatkan antusiasme yang tergambarkan secara nilai rupiah ada peningkatan. Secara kapabilitas pelaporan *digital* pajak perlu dikomparasikan dengan piutang pajak wajib pajak. Sehingga setiap tahunnya selain peningkatan pelaporan *digital* dari sisi piutang pajak menurun karena sudah termonitor secara digital oleh Dirjen Pajak

b. MEA 2 – Monitor, Evaluasi, Penilaian Pengendalian Internal Sistem

Pelaporan pajak secara digital perlu didukung infrastruktur yang sesuai, termonitor oleh Dirjen Pajak, rahasia terjaga bagi wajib pajak, dan memudahkan wajib pajak untuk lapor, mengingat wajib pajak terdiri dari segala macam golongan baik individu sampai pengusaha. Bentuk pengendalian *Internal* Sistem Dirjen Pajak ini dapat dikatakan cukup baik karena proses *release audited* aporan keuangan cukup cepat. Laporan Pajak 2016 pelaporan selesai di 23 Juni 2017; kemudian untuk pelaporan 2018 selesai di 20 Mei 2019.

Dari hasil ini disimpulkan proses konsolidasi laporan Kantor Wilayah seluruh Indonesia sudah terintegrasikan oleh sistem dengan cukup baik, mengingat tanggal *audited report* setiap tahunnya berdekatan. MEA 3 – *Monitor*, Evaluasi, Penilaian Kesesuaian dengan Kebutuhan Eksternal

Pelaporan digital laporan pajak pun berpengaruh besar terhadap negara yang pemerintah membutuhkan laporan realisasi pelaporan pajak untuk pembuatan anggaran belanja negara tahun berikutnya, menetapkan program, dan melakukan penargetan penerimaan pajak tahun berikut. Selain itu, kesadaran pelaporan pajak mendukung program yang sudah ditetapkan seluruh negara dalam IMF.

Secara pelaporan pemerintah Indonesia sudah mengupayakan dengan baik menggunakan pelaporan digital yang sebelumnya masih sangat konvensional dan para wajib pajak enggan untuk melaporkan pajaknya. Akan tetapi, seiring berjalan program pelaporan pajak dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pelaporan pajak secara *digital* efektif dalam meningkatkan partisipasi para wajib pajak, selain itu berdasarkan pelaporan pajak tersebut terbukti pembuatan laporan *audited* dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan negara

untuk menentukan rencana ke depan. Hal ini, membuktikan kapabilitas pelaporan pajak *digital* pada *framework* MEA dalam cobit 5.0 sudah mengakomodiir *Monitor*, *Evaluate*, dan *Assess* yang diperlukan. Yang perlu dikembangkan pengembangan sistem pelaporan yang sudah terintegrasi secara otomatis *end to end*.

REFERENCES

- [1] Gibson, James L. Ivancevich, John M. Donnelly, James H. Konopaske, Robert. Organizations Behaviour, Structure, Processes. McGraw Hill 14th Edition. 2012: Page 39
- [2] Hakim, Muhammad Malik. Analisis Model Penerimaan Pengguna Sistem Pelaporan Pajak *Online*. Jurnal Teknik Mesin, Elektro, dan Ilmu Komputer 7 (1), 365-372. 2016.
- [3] ISACA, COBIT 5. A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. ISACA Personal Copy of : Chris Rose. 2012 : Page 32 33
- [4] Laporan Keuangan dari website : www.kemenkeu.go.id